

Transformasi Ruang Pasca Konflik Sosial di Kecamatan Sirimau, Ambon (1999 - 2024)

Erianda Putra¹, Pieter Th. Berhitsu¹, Risal Rasyid^{3*}

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pattimura

*e-mail: work.risalrasyid@gmail.com

ABSTRACT

Before 1999, Sirimau District was characterized by a religiously diverse population. In 1999, a horizontal conflict with ethno-religious dimensions (SARA) erupted, leading to substantial transformations in social spaces defined here as areas that facilitate everyday social practices. This study examines the transformation of these spaces across three phases: before the conflict (pre-1999), during the conflict (1999-2004), and after the conflict (2005–2024). A qualitative case study approach was employed, incorporating empirical-descriptive analysis, spatial-temporal methods, participatory mapping, and both synchronic and diachronic perspectives to trace spatial changes over time. The findings reveal that the conflict triggered both physical and non-physical transformations of social space, and new social spaces also emerged during the conflict period. These changes occurred gradually, evolving alongside the phases of the conflict. This study contributes to the understanding of post-conflict urban transformation in Eastern Indonesia, highlighting the emergence of new social spaces and spatial reconfigurations as mechanisms of informal reconciliation.

Keywords: Ambon Conflict, Post-Conflict Transformation, Socio-Spatial Segregation,

ABSTRAK

Kecamatan Sirimau sebelum tahun 1999 memiliki penduduk dengan latar belakang agama yang beragam. Pada tahun 1999 terjadi konflik horizontal bernuansa SARA yang mengakibatkan transformasi pada ruang-ruang sosial. Ruang Sosial sendiri merupakan ruang yang mewadahi aktivitas sehari-hari masyarakat (*spatial practise*). Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana transformasi ruang sosial tersebut, yang akan dikaji dalam 3 (tiga) tahapan yakni sebelum konflik (sebelum tahun 1999), saat masa konflik (tahun 1999-2004), dan sesudah konflik (tahun 2005-2024). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alat analisis yang digunakan yaitu, deskriptif empiris, *spatial temporal*, *participatory mapping*, serta sinkronik dan diakronik untuk mendapatkan gambaran informasi tentang perubahan ruang sosial mulai dari sebelum konflik tahun 1999 hingga sesudah konflik. Temuan dari penelitian ini adalah ruang sosial mengalami transformasi akibat adanya konflik sosial, mulai dari transformasi secara fisik maupun non fisik, selain itu terdapat ruang sosial baru yang muncul saat konflik terjadi. Proses transformasi ruang sosial terjadi tidak secara spontan, melainkan mengalami perubahan secara bertahap seiring dengan fase konflik yang terjadi. Penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan transformasi perkotaan pasca-konflik di Indonesia Timur melalui kemunculan ruang sosial baru dan penataan ulang spasial sebagai bentuk rekonsiliasi informal.

Kata kunci: Konflik Ambon, Segregasi Sosio Spasial, Transformasi Pasca Konflik

1. PENDAHULUAN

Kota akan selalu mengalami perkembangan dimana perkembangan sebuah kota merupakan proses yang dinamis dari waktu ke waktu. (Az-Zahra, 2023). Perkembangan fisik kota akan terus berlangsung seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, angka kelahiran dan kematian serta migrasi yang berdampak terhadap meningkatnya permintaan terhadap ruang atau lahan sehingga mengakibatkan perubahan pada wilayah perkotaan.

Perubahan tersebut terjadi karena ruang-ruang di perkotaan merupakan perwujudan kehidupan keseharian masyarakat kota dimana semua perubahan yang terjadi juga mempengaruhi bentuk kota. Hal ini dikarenakan perkotaan merupakan produk ruang dan waktu sebagai perpaduan dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan budaya perkotaan yang menciptakan ruang (Ayudya & Ikaputra, 2022). Sementara itu, salah satu persoalan kompleks yang dihadapi wilayah perkotaan sejak dulu hingga saat ini adalah banyaknya terdapat perbedaan-perbedaan mendasar dalam masyarakat yang mendominasi dalam proses pembentukan perkotaan (Sigit et al., 2015).

Kota Ambon merupakan kota yang heterogen, baik budaya, etnik, maupun agama (Abdul, 2018). Pada tahun 1999 terjadi konflik sosial di Kota Ambon yang bernuansa keagamaan antara kelompok masyarakat. Konflik yang diawali dengan masalah antara dua orang yang berbeda secara agama tersebut menjadi pemicu konflik komunal yang terjadi selama kurun waktu tahun 1999 sampai 2004. Konflik sosial ini sendiri diselesaikan dengan kebijakan rekonstruksi oleh pemerintah daerah, namun tanpa disadari kebijakan tersebut memberikan dampak tidak langsung dan tidak disengaja (*unintended consequence*) berupa segregasi sosio-spasial (Ansori et al., 2014). Kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat perkotaan di Ambon. Pasalnya, kebijakan tersebut memberikan perubahan terhadap ruang perkotaan. Segregasi sosio-spasial yang dimaksud berupa transformasi ruang-ruang bermukim masyarakat yang disesuaikan dengan latar belakang agama atau kepercayaan yang dominan di suatu wilayah atau kawasan. Artinya, pola pilihan tempat tinggal telah dipengaruhi oleh kesamaan agama yang dianut, sehingga karakteristik desa/ kelurahan di Kota Ambon secara umum dicirikan oleh agama di kawasan tertentu. Masyarakat yang beragama Kristen dipersepsikan bertempat tinggal di daerah perbukitan, sedangkan orang-orang Ambon yang beragama islam lebih cenderung berdomisili di pinggiran pantai. (Ansori et al., 2014).

Ruang bermukim masyarakat Kota Ambon terkotak-kotak pada beberapa wilayah atau kawasan tertentu sesuai dengan agama yang dianut, seperti di Desa Latuhalat, Amahusu, Kelurahan Kudamati, Kelurahan Wainitu dan lainnya dominan ditempati oleh penduduk beragama Kristen. Daerah sekitar pelabuhan, Talake, Tamaela, Mardika, Batu Merah, kawasan Mesjid An-Nur dan Al-Fatah merupakan kantong-kantong permukiman penduduk muslim (Nainggolan, 2012). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses perubahan ruang yang terjadi pasca konflik sosial di Kota Ambon terkhususnya pada daerah Kecamatan Sirimau yang merupakan pusat terjadinya konflik.

2. KAJIAN LITERATURE

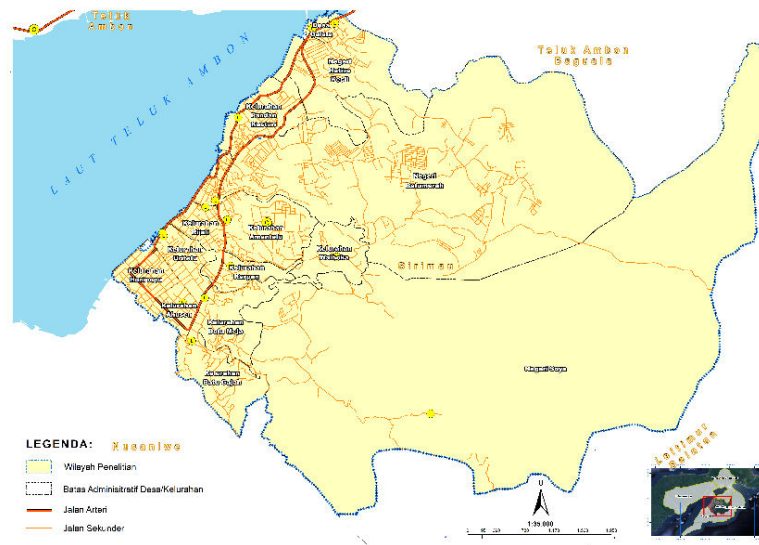
2.1. Teori Ruang Sosial

Lefebvre berpendapat bahwa hubungan sosial bersifat spasial dan terhubung dengan ruang sosial (Babere, 2015). Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Rapoport (1977) bahwa ruang sosial (*socio space*) adalah ruang yang digunakan oleh suatu kelompok sosial yang mencerminkan pola tingkah laku dan persepsi mereka. Ruang sosial yang terbentuk merupakan wadah bagi masyarakat dalam melakukan “aktivitas sosial”, dalam ruang ini terjadi interaksi antar masyarakat dengan lingkungannya. Ruang yang terjadi merupakan hasil dari proses sosial yang mewakili karakteristik masyarakat pencipta dan pemakainya (Permana, 2014). Dalam melihat dan memahami *socio space* pada suatu lingkungan, maka terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana masyarakat memahami lingkungannya. Karena hal ini tidak terlepas dari pengaruh latar belakang sosial-ekonomi, budaya masyarakat pemakainya. Lefebvre menyimpulkan bahwa proses dari produksi sosial selalu mengkaitkan kondisi fisik dari ruang atau alam yg ada, keadaan mental atau kekuatan konsep terkait logika dan abstraksi formal, dan keadaan sosial atau masyarakat sebagai penggerak utama perubahannya (Lefebvre, 1991). Pemahaman konsep ini dikenal sebagai *The Conceptual Triad of Space* yakni terdapat 3 (tiga) kelompok ruang berdasarkan pembagian sistem produksinya

- a. Ruang yang mewadahi aktivitas sehari-hari atau *spatial practise*, ruang ini dirasakan oleh pemakaiannya dan lebih banyak bersifat fisik sebagai ruang yang benar-benar dialami. Secara konkret, *spatial practise* merupakan jaringan interaksi dan komunikasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, koneksi sehari-hari antara tempat kerja dan hunian) atau dalam proses produksi (produksi dan hubungan pertukaran);
- b. Ruang yang diabstraksikan untuk memenuhi kepentingan produksi sehingga harus memenuhi pencitraan termasuk di dalamnya cara tinggal yang disebut sebagai *representation of space* atau representasi mengenai konsepsi ruang yang ideal. Ruang semacam ini biasanya berada dalam ide atau gagasan ataupun dokumen perencanaan dan perancangan kota yang dikonsepkan oleh kelompok profesi tertentu misalnya pelukis, arsitek, atau perencana; dan
- c. Ruang Ketiga adalah ruang yang merepresentasikan atau *representational spaces* untuk mewadahi kepentingan citra-citra atau simbol yang berada dalam kenyataan misalnya kekuatan politik, prinsip kekuatan gender, kekuatan ekonomi, dan adanya segregasi sosial.

3. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 hingga Januari 2025, dengan lokasi penelitian mencakup desa dan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sirimau, salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Ambon. Pemilihan Kecamatan Sirimau sebagai lokasi penelitian didasarkan pada posisinya yang strategis di pusat kota. Selain itu, berdasarkan hasil studi dokumen, telaah literatur, serta informasi yang diperoleh dari masyarakat, diketahui bahwa Kecamatan Sirimau mengalami dinamika perubahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi titik konflik yang terpusat di wilayah tersebut.



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Sirimau

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian serta wawancara mendalam dengan para informan, dan juga data sekunder yang bersumber dari studi pustaka serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait. Dalam proses pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* diterapkan untuk menentukan informan awal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif, relevan, dan dapat diukur mengenai kondisi ruang sosial sebelum, saat konflik, dan sesudah terjadinya konflik, serta proses transformasi yang menyertainya. Selanjutnya, teknik *snowball sampling* digunakan untuk menjangkau informan-informan tambahan melalui rekomendasi dari informan awal. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini mencakup:

- Tokoh agama atau tokoh adat yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat;
- Sejarawan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai dinamika historis wilayah penelitian;
- Aktivis yang terlibat dalam isu-isu sosial dan rekonsiliasi pasca-konflik;
- Penduduk yang secara langsung mengalami dan menjadi saksi atas konflik sosial yang terjadi di lokasi penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai kategori informan guna memperoleh data yang konsisten dan menyeluruh, sedangkan triangulasi metode diterapkan melalui kombinasi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk memperkuat validitas temuan. Selain itu, keabsahan data diuji melalui teknik *member check* dengan meminta konfirmasi dari informan terkait hasil interpretasi peneliti, agar sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dipadukan dengan analisis sinkronik-diakronik. Studi kasus merupakan pendekatan kualitatif dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman nyata dalam suatu sistem terikat yang bersifat kontemporer (kasus tunggal) maupun sistem terikat ganda (multi kasus), melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam dari berbagai sumber informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami esensi dari suatu fenomena (misalnya melalui observasi, wawancara, materi audiovisual, dan berbagai dokumen laporan), serta menyajikan deskripsi kasus dan tema-tema utama dari kasus tersebut (Creswell, 2014). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar bersifat naratif dan disampaikan secara langsung oleh masyarakat. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji bagaimana transformasi spasial terjadi di wilayah penelitian pasca konflik sosial tahun 1999 di Kota Ambon, berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, observasi langsung, dan dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam untuk menelusuri proses transformasi spasial yang terjadi dalam rangka mengakomodasi aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, serta untuk memahami dinamika dari proses transformasi tersebut. Hasil wawancara terkait proses transformasi spasial kemudian dipetakan dan disajikan dalam bentuk peta perbandingan transformasi spasial lintas waktu. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memvisualisasikan proses transformasi spasial yang

berlangsung dalam rangka mengakomodasi aktivitas keseharian, baik sebelum maupun sesudah konflik sosial tahun 1999 di Kota Ambon.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori ruang sosial yang dikemukakan oleh Rapoport (1977) dan Lefebvre (1991), yang mengonseptualisasikan ruang sebagai wadah bagi aktivitas sehari-hari (praktik spasial), peneliti mengidentifikasi ruang-ruang sosial yang terdapat di wilayah studi Kecamatan Sirimau. Ruang-ruang tersebut mencakup ruang bermukim, ruang ekonomi, ruang pelayanan kesehatan, ruang pendidikan, dan ruang keagamaan. Selain merujuk pada teori dan variabel penelitian yang telah disebutkan, analisis terhadap kondisi spasial ini juga sejalan dengan temuan empiris yang diperoleh peneliti di lapangan.

4.1 Ruang Bermukim

Ruang bermukim masyarakat Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Sirimau, mengalami transformasi secara bertahap selama periode konflik. Sebelum konflik, pola permukiman di wilayah ini telah menunjukkan segregasi berdasarkan identitas keagamaan, yang merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Kendati demikian, sejumlah kawasan masih mempertahankan karakter keberagaman agama. Sebagai contoh, di Negeri Hative Kecil yang mayoritas berpenduduk Kristen, terdapat pula komunitas Muslim dari etnis Buton. Demikian pula di Kelurahan Amantelu, wilayah seperti Batu Merah Dalam dan Karpan Pule dihuni oleh masyarakat Muslim dan Kristen yang hidup berdampingan. Di kawasan Halong Mardika (Kelurahan Rijali), yang mayoritas beragama Kristen, tercatat antara 3 hingga 10 kepala keluarga Muslim menetap di area yang sama. Secara umum, sebelum konflik, kehidupan permukiman di Kecamatan Sirimau ditandai oleh relasi sosial yang relatif harmonis dan koeksistensi antar umat beragama di berbagai desa dan lingkungan..

Tahap awal dari transformasi ruang permukiman dimulai sejak pecahnya konflik pada 19 Januari 1999. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan dominasi kelompok agama tertentu cenderung memilih untuk mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman guna menghindari kekerasan. Beberapa di antaranya terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat ancaman perusakan atau pembakaran oleh kelompok dari latar belakang agama yang berbeda. Para pendatang yang sebelumnya bermigrasi ke Kota Ambon pun banyak yang memilih kembali ke kampung halaman demi keselamatan, sementara sebagian lainnya tetap bertahan di Ambon namun berpindah ke kawasan yang lebih sesuai dengan identitas keagamaannya. Kondisi ini menyebabkan kawasan-kawasan yang sebelumnya bersifat

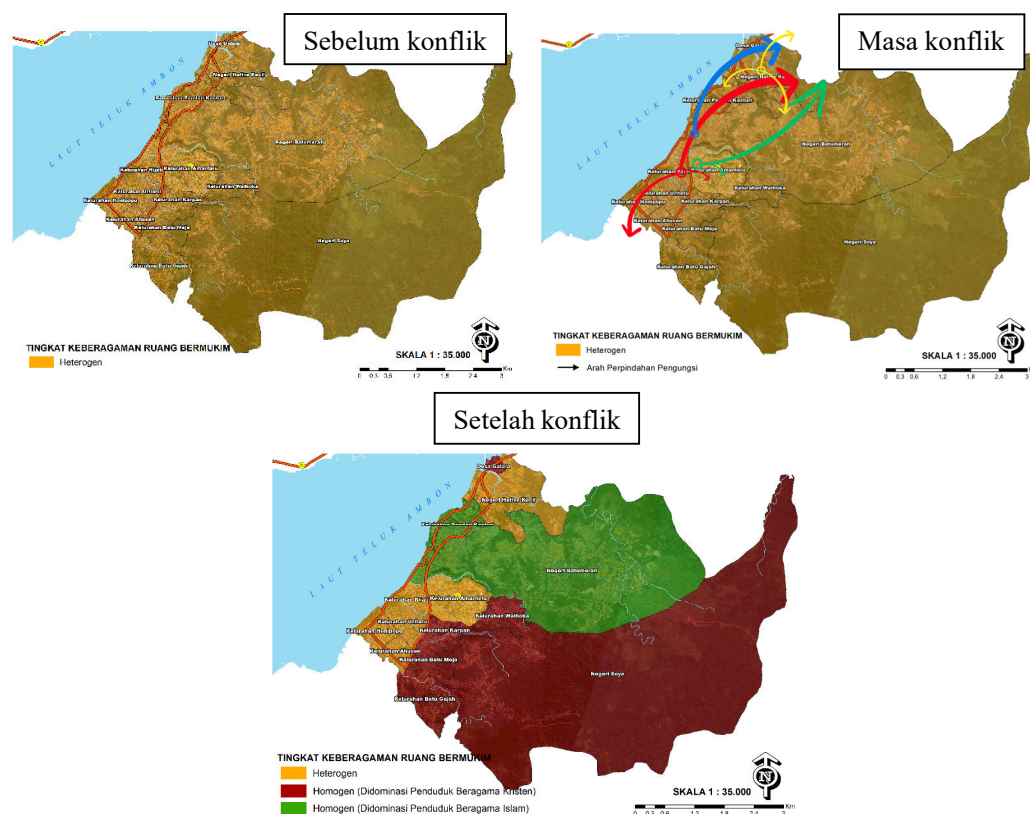
heterogen secara keagamaan menjadi semakin tersegregasi, di mana tiap wilayah didominasi oleh satu kelompok agama tertentu.

Tahap kedua dari transformasi ruang permukiman terjadi ketika konflik kembali memuncak pada awal dekade 2000-an. Warga Kristen di Kelurahan Rijali, khususnya yang bermukim di kawasan Halong Mardika/Lorong Tahu, memilih untuk mengungsi setelah tempat tinggal mereka mengalami pembakaran pada sekitar tahun 2000–2001. Sebagian besar korban dari komunitas Kristen di wilayah tersebut mengungsi ke rumah sanak saudara di daerah seperti Karpan, Lateri, Halong, Latuhalat, dan beberapa kawasan lainnya. Hal serupa juga dialami oleh warga Muslim yang tinggal di Negeri Hative Kecil, yang memilih meninggalkan tempat tinggal mereka demi mencari perlindungan di lokasi yang lebih aman. Sebagian besar dari mereka kemudian bermukim di wilayah-wilayah yang memiliki kesamaan latar belakang keagamaan, seperti Wara (Kelurahan Batu Merah), Kapaha (Kelurahan Pandan Kasturi), dan Waiheru.

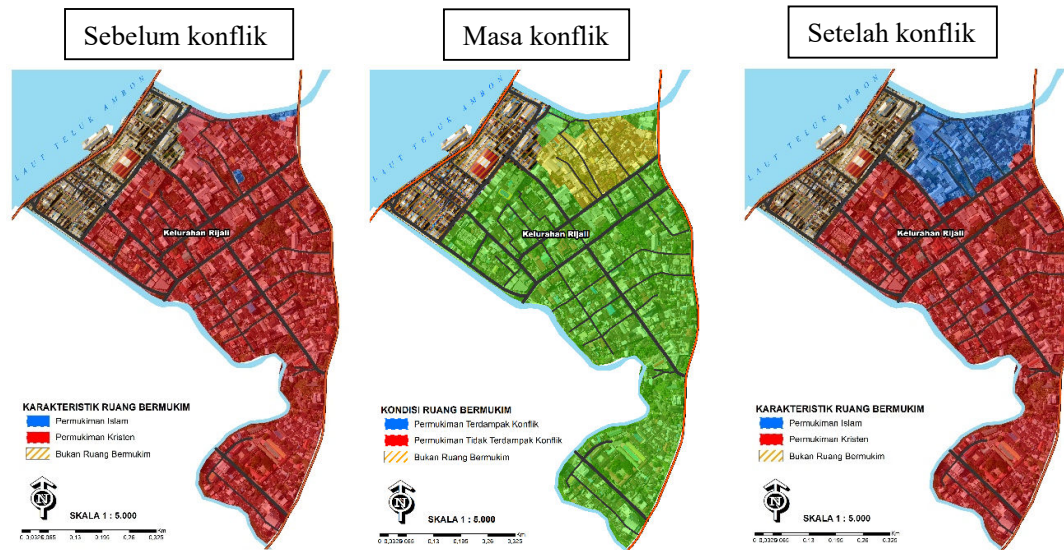
Setelah meredanya konflik pada tahun 2005, masyarakat Kota Ambon secara umum mengalami kondisi traumatis akibat peristiwa yang terjadi. Hal ini mendorong masyarakat untuk menjadi lebih selektif dalam memilih lokasi permukiman pasca-konflik, yang pada akhirnya mempertegas pola segregasi yang telah terbentuk sebelumnya. Pada periode ini, pemerintah mulai memfokuskan perhatian pada penanganan pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Sebagai contoh, jemaat Bethabara yang sempat dievakuasi ke asrama atlet Karang Panjang (Kelurahan Amantelu) selama masa konflik, diberikan ruang permukiman baru di Dusun Kayu Tiga (Desa Soya) dan direlokasi pada 30 April 2006. Di samping itu, dalam proses penyelesaian persoalan pengungsi, berkembang sistem pertukaran lahan yang dikenal sebagai tukar guling antara dua kelompok komunitas. Sistem ini melibatkan pertukaran lahan antarindividu yang sebelum konflik tinggal di wilayah dengan dominasi agama yang berbeda dengan latar belakang mereka, dengan individu lain yang memiliki kesamaan identitas keagamaan dengan lingkungan tempat tinggal baru. Meskipun sistem ini mulai muncul selama konflik berlangsung, praktiknya menjadi lebih intensif setelah konflik mereda..

Sejak tahun 2008, masyarakat secara bertahap mulai menunjukkan kecenderungan hidup secara terkompartemen, di mana penduduk memilih untuk menetap di wilayah yang sesuai dengan latar belakang keagamaan mereka. Sebagai contoh, bekas permukiman warga Buton di Negeri Hative Kecil telah mengalami transformasi menjadi kawasan heterogen yang kini didominasi oleh penduduk lokal beragama Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode pasca-konflik, warga Kecamatan Sirimau cenderung memilih lingkungan permukiman yang sejalan dengan afiliasi keagamaan mereka. Akibatnya, kawasan permukiman atau klaster

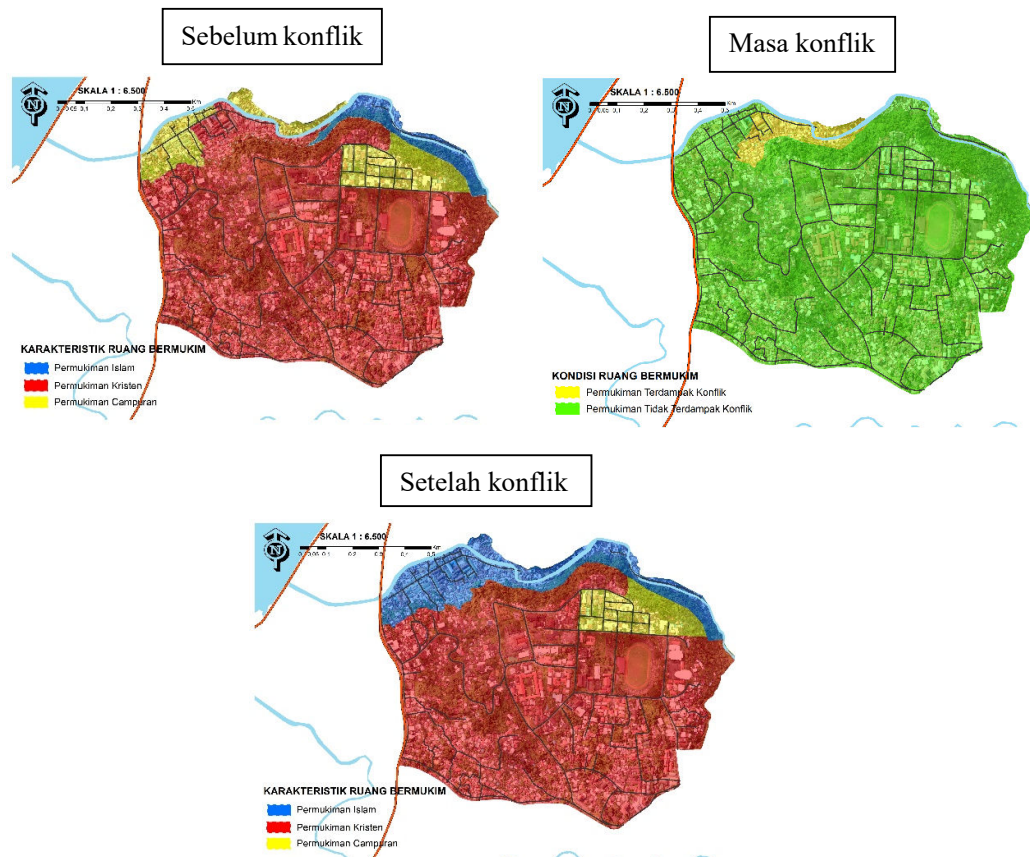
yang sebelumnya bersifat heterogen di beberapa desa telah berubah menjadi klaster homogen berdasarkan identitas agama. Transformasi ini menunjukkan kesesuaian dengan gagasan yang dikemukakan Lefebvre mengenai *Representational Space*, dimana ruang fisik dimaknai secara ideologi dan berubah menyesuaikan dengan dominasi sosial (religius) serta ruang yang merupakan produk politik. Gambaran spasial mengenai proses transformasi ruang sosial di Kecamatan Sirimau pasca-konflik sosial tahun 1999 di Kota Ambon dapat dilihat melalui hasil analisis pemetaan partisipatif yang dilakukan bersama sejumlah responden dan melalui observasi langsung di lapangan.



Gambar 2. Transformasi Spasial ruang bermukim berdasarkan kelompok di Kelurahan Rijali (gambaran sinkronik)
Sumber: Analisis Penulis, 2025



Gambar 3. Transformasi Spasial ruang bermukim berdasarkan kelompok di Kelurahan Rijali (gambaran diakronik)
Sumber: Analisis Penulis, 2025



Gambar 4. Transformasi Spasial ruang bermukim berdasarkan kelompok di Kelurahan Amantelu (gambaran diakronik)
Sumber: Analisis Penulis, 2025

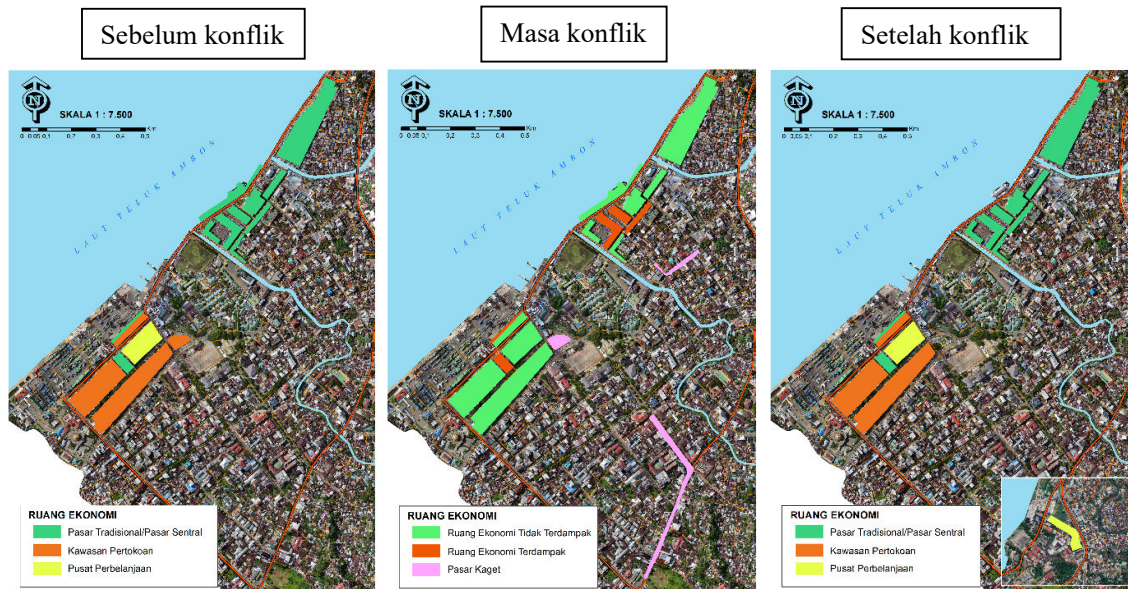
4.2 Ruang Ekonomi

Sebelum terjadinya konflik, kehidupan ekonomi di Kota Ambon khususnya di Kecamatan Sirimau yang merupakan pusat kota berpusat pada kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pasar-pasar utama seperti Pasar Mardika, Pasar Batu Merah, dan Pasar Lama berfungsi sebagai pusat perdagangan penting, tidak hanya bagi Pulau Ambon, tetapi juga bagi Provinsi Maluku secara keseluruhan, karena lokasinya yang strategis di pesisir dan dekat dengan terminal serta pelabuhan penumpang. Selain itu, berbagai toko tersebar di sepanjang jalan utama seperti Jalan A.Y. Patty, Jalan Said Perintah, dan Kawasan Pertokoan Pelita di Jalan Slamet Riyadi. Salah satu ciri khas ekonomi Kota Ambon adalah peran besar para pendatang, baik dari dalam Provinsi Maluku maupun dari luar daerah, khususnya masyarakat dari Sulawesi seperti komunitas Bugis, Buton, dan Makassar (BBM) yang sangat berpengaruh dalam perdagangan di pasar tradisional.

Proses perubahan dimulai selama masa konflik, yang ditandai dengan hancurnya ruang-ruang ekonomi yang sebelumnya ada. Sebagai contoh, Kawasan Pertokoan Pelita yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan ekonomi, dibakar pada hari kedua konflik. Lokasi ini juga berfungsi sebagai terminal (Staandplast) tempat parkir kendaraan angkutan kota dari berbagai jurusan. Demikian pula, beberapa ruko di Pasar Mardika turut dibakar saat puncak konflik di kawasan Halong Mardika. Ruang-ruang ekonomi, seperti pasar tradisional atau pasar pusat yang terletak di wilayah yang didominasi oleh kelompok agama tertentu, cenderung dikuasai oleh kelompok tersebut. Hal ini menyebabkan ruang-ruang ekonomi tersebut menjadi kurang dapat diakses oleh individu dari latar belakang agama yang berbeda karena alasan keamanan pribadi. Akibatnya, selama konflik, muncul ruang-ruang ekonomi baru seperti "Pasar Kaget" dan "Pasar Bakubae" yang bersifat sementara. Contohnya termasuk pasar kaget di kawasan Citra (Kelurahan Rijali) dan di sepanjang Jalan Pattimura hingga Jalan Jend. A. Yani (Kelurahan Batu Meja). Selain itu, karakteristik ekonomi masyarakat Kota Ambon juga mengalami perubahan. Banyak warga yang beralih ke pekerjaan informal, seperti pengayuh becak, pengemudi ojek, pedagang kaki lima, dan pedagang kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama masa konflik.

Tahap kedua dari transformasi spasial ini berlangsung ketika intensitas konflik mulai menurun sekitar tahun 2005. Aktivitas ekonomi perlahan mulai pulih, meskipun masih disertai dengan rasa cemas di kalangan masyarakat dalam memanfaatkan ruang-ruang ekonomi. Pada

tanggal 25 November 2009, Kawasan Pertokoan Pelita yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat pembakaran selama masa konflik, direvitalisasi menjadi ruang terbuka publik yang dilengkapi dengan simbol perdamaian berupa Gong Perdamaian. Seiring dengan meredanya konflik, muncul sejumlah ruang ekonomi baru. Sebagai ilustrasi, pusat perbelanjaan *Maluku City Mall* (MCM) dibangun pada tahun 2013 di atas bekas lahan rumah sakit yang terletak di wilayah Negeri Hative Kecil. Di samping itu, pasar-pasar sementara yang muncul selama konflik di Kecamatan Sirimau, seperti di sepanjang Jalan Pattimura dan Jalan Jenderal A. Yani (Kelurahan Batu Meja), berkembang menjadi kios-kios permanen yang menyediakan makanan siap saji. Hingga saat ini, ruang-ruang ekonomi yang telah eksis sebelum konflik tetap berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi utama bagi masyarakat Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Sirimau. Beberapa di antaranya mencakup Pasar Mardika, Pasar Batu Merah, Pasar Lama, Pasar Gotong Royong, serta Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza. Fenomena ini merefleksikan bahwa ruang ekonomi pasca-konflik di Kota Ambon tidak semata mengalami pemulihan secara fisik, melainkan juga merepresentasikan proses rekonstruksi dan negosiasi ulang atas makna serta fungsi ruang dalam konteks relasi sosial dan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan dalam kerangka teori ruang sosial oleh Henri Lefebvre.



Gambar 5. Transformasi spasial ruang ekonomi di Kecamatan Sirimau
Sumber: Analisis Penulis, 2025

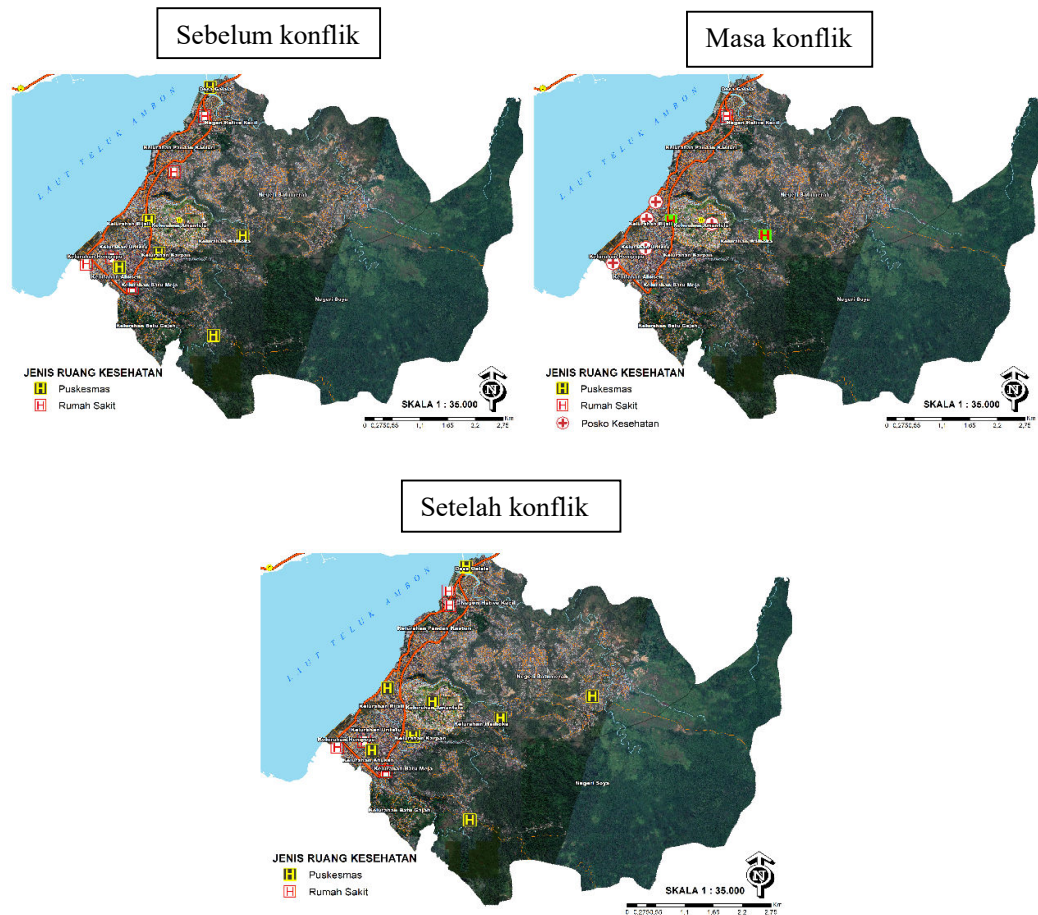
4.3 Ruang Kesehatan

Sebelum terjadinya konflik, fasilitas layanan kesehatan di Kecamatan Sirimau mencakup sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan empat rumah sakit

yang tersebar di berbagai kelurahan dan desa. Konsentrasi rumah sakit di Kota Ambon sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Sirimau, mencerminkan fungsinya sebagai pusat aktivitas kota, termasuk kegiatan pemerintahan, ekonomi, serta kawasan permukiman mayoritas penduduk.

Tahap pertama dari transformasi ruang layanan kesehatan terjadi selama masa konflik, ketika berbagai fasilitas kesehatan mengalami dampak signifikan. Salah satu peristiwa awal adalah pembakaran Rumah Sakit Otto Kuyk di Negeri Hative Kecil pada Januari 1999. Selain itu, Rumah Sakit GPM Sumber Hidup di Kelurahan Honipopu terpaksa memindahkan pelayanan kesehatannya ke Gedung Baileo Oikumene di sekitar Gereja Maranatha akibat kerumunan massa yang mengganggu aktivitas rumah sakit. Hal serupa terjadi pada Puskesmas Rijali yang berlokasi di perbatasan wilayah konflik; fasilitas ini dipindahkan ke lokasi yang lebih aman di sekitar Pasar Batu Merah. Pada fase ini, sejumlah pos kesehatan darurat didirikan untuk melayani korban konflik di berbagai titik pengungsian, seperti Gereja Maranatha, Masjid Al-Fatah, serta area konflik seperti ruko Pasar Batu Merah dan kawasan Mardika (Kelurahan Rijali). Pada masa yang sama, dua rumah sakit baru muncul: RS Bhayangkara di Negeri Hative Kecil dan RS Ibu dan Anak Al-Fatah yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit umum.

Setelah melewati proses transformasi selama masa konflik, ruang-ruang layanan kesehatan juga mengalami perubahan pada periode pasca-konflik. Salah satu contohnya adalah bekas lokasi Rumah Sakit Otto Kuyk yang kemudian dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan (mall) pada tahun 2013. Demikian pula, bekas Rumah Sakit Al-Muqaddam kini telah diubah menjadi penginapan dan rumah sewa. Selain itu, sejumlah Puskesmas baru didirikan di wilayah Kecamatan Sirimau guna memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, fasilitas kesehatan lain seperti Rumah Sakit Siloam mulai dibangun pada tahun 2014 dan resmi beroperasi pada tahun 2020. Hingga kini, Kecamatan Sirimau memiliki empat rumah sakit dan delapan Puskesmas yang aktif beroperasi, mencerminkan dinamika rekonstruksi ruang kesehatan sebagai bagian integral dari proses pemulihan pasca-konflik. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan gagasan Lefebvre mengenai representational space, yakni ruang dimaknai secara ideologis oleh masyarakat serta adanya peran kebijakan pemerintah.



Gambar 6. Transformasi spasial ruang kesehatan di Kecamatan Sirimau
Sumber: Analisis Penulis, 2025

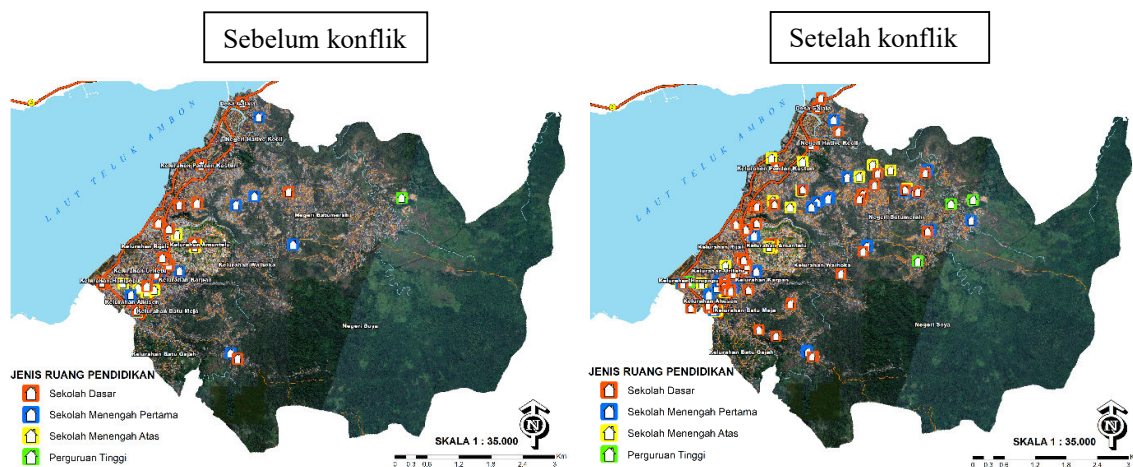
4.4 Ruang Pendidikan

Kecamatan Sirimau, sebagai kawasan hunian yang diminati, turut memerlukan penyediaan ruang-ruang yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya ruang pendidikan. Sebelum terjadinya konflik, fasilitas pendidikan sebagian besar terpusat di pusat kota, terutama di Kecamatan Sirimau. Kawasan ini menjadi lokasi bagi sejumlah sekolah yang telah lama berdiri, seperti SD Negeri 1, SMP Negeri 6, dan SMA Negeri 1, serta berbagai institusi pendidikan lainnya. Sekolah-sekolah ini menarik siswa dari latar belakang ekonomi, sosial, dan agama yang beragam.

Tahap pertama dari transformasi pendidikan terjadi pada masa konflik, ditandai dengan peristiwa penghancuran Yayasan Al-Hilal Ambon, termasuk gedung sekolahnya yang berlokasi di Jalan Anthony Rebook, pada tanggal 19 Januari 1999. Pasca peristiwa tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam komposisi siswa di sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan

dominasi komunitas agama tertentu. Jika sebelumnya sekolah-sekolah tersebut memiliki populasi siswa yang heterogen, konflik menyebabkan pergeseran preferensi, di mana banyak siswa memilih untuk tidak bersekolah di wilayah yang didominasi oleh kelompok agama yang berbeda. Kondisi ini memberikan gambaran kesesuaian dengan gagasan Lefebvre dimana ruang pendidikan menjadi wadah pengalaman simbolik dan emosional yang dipengaruhi oleh identitas, rasa aman, dan relasi kuasa (religius).

Tahap kedua transformasi didorong oleh kesenjangan dalam distribusi ruang pendidikan. Sebagai bentuk respons, pada tahun 2004 dan 2005, pemerintah membangun sejumlah fasilitas pendidikan baru di wilayah yang secara demografis didominasi oleh komunitas agama tertentu. Sebagai contoh, di Kelurahan Batu Merah, pemerintah mendirikan dua Sekolah Menengah Atas (SMA) guna mengakomodasi kebutuhan pendidikan siswa Muslim yang sebelumnya menempuh pendidikan di kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Saat ini, Kecamatan Sirimau memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang cukup signifikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.



Gambar 7. Transformasi spasial ruang pendidikan di Kecamatan Sirimau
Sumber: Analisis Penulis, 2025

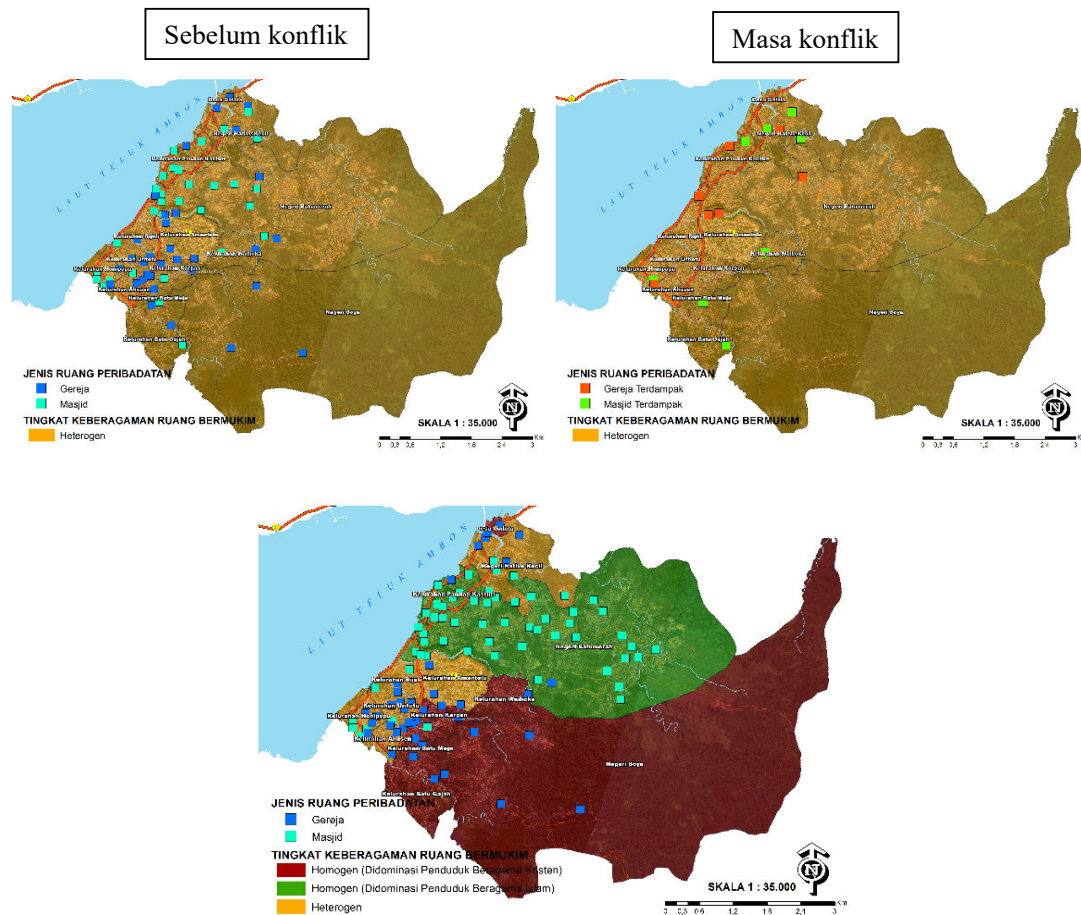
4.5 Ruang Peribadatan

Ruang-ruang peribadatan merupakan salah satu elemen yang paling terdampak akibat konflik horizontal yang terjadi di Kota Ambon antara tahun 1999 hingga 2004. Sejak pecahnya konflik pada tanggal 19 Januari 1999 yang bertepatan dengan perayaan Idulfitri, sejumlah rumah ibadah baik masjid maupun gereja yang berada di kantong-kantong permukiman warga menjadi sasaran pembakaran dan perusakan. Salah satu peristiwa awal yang mencerminkan

eskalasi konflik tersebut adalah pembakaran Masjid As Sa'adah di Kelurahan Waihoka pada tanggal 20 Januari 1999.

Ruang-ruang ibadah yang sebelumnya berada di kawasan permukiman heterogen mengalami transformasi signifikan seiring dengan mengungsi atau berpindahnya penduduk, baik Muslim maupun Kristen dari wilayah tersebut selama masa konflik. Beberapa temuan diantaranya, bangunan bekas gereja seperti Bethabara dan Diokronus di Kelurahan Amantelu, serta bekas Gereja BK di kawasan Tanjong Batu Merah, kini telah beralih fungsi menjadi bangunan hunian. Sementara itu, bekas lokasi Masjid As Sa'adah di Kelurahan Waihoka, meskipun masih menyisakan struktur rangka bangunan, saat ini dimanfaatkan sebagai area parkir oleh warga sekitar. Transformasi ruang peribadatan ini sebagian besar terjadi selama periode konflik, mengingat ruang peribadatan kerap menjadi simbol dan target serangan dalam konteks konflik horizontal. Sebagai ilustrasi, Gereja Silo mengalami kebakaran pada bulan Desember 1999, diikuti dengan pembakaran Masjid An-Nur yang terletak berdekatan dengan Gereja Silo pada periode yang sama.

Pasca meredanya konflik pada tahun 2005, dengan kecenderungan masyarakat Kota Ambon untuk tinggal dalam lingkungan dengan kesamaan afiliasi agama, pembangunan ruang-ruang ibadah baru mulai berlangsung. Sebagai contoh, pengungsi dari kawasan Batu Merah Dalam membangun gedung Gereja Bethabara yang baru di lokasi pemukiman mereka saat ini di Dusun Kayu Tiga, Negeri Soya. Demikian pula, jemaat Kezia yang berpindah dari Kebun Cengkeh (Kelurahan Batu Merah) ke Dusun Siwang di Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, mendirikan gereja di lokasi tempat tinggal mereka yang baru. Selain itu, warga pendatang yang menetap di kawasan Halong Mardika membangun masjid guna memenuhi kebutuhan ibadah harian mereka. Fenomena ini mencerminkan *representational space* dalam pemikiran Lefebvre, yang mana ruang peribadatan selain menjadi ruang ibadah, juga dimaknai secara simbolik dan emosional berdasarkan pengalaman historis kolektif, membentuk identitas keagamaan masyarakat pasca konflik



Gambar 8. Transformasi spasial ruang peribadatan di Kecamatan Sirimau
Sumber: Analisis Penulis, 2025

4.6 Ruang Netral/Ruang Transaksi

Ruang netral adalah ruang yang terbentuk pada saat masa konflik terjadi di Kota Ambon. Ruang ini memiliki peran yang penting ketika konflik berlangsung, hal ini dikarenakan ruang netral menjadi wadah untuk bertemunya dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang agama namun diharuskan untuk bertemu untuk melakukan kegiatan seperti tukar menukar barang, pembayaran hak, hingga sekedar melepas kerinduan. Selain itu ruang – ruang netral yang terbentuk saat konflik mempunyai karakteristik aktifitas masing-masing, mulai dari tempat terjadinya transaksi, perpindahan logistik, pertemuan bahkan hingga pemeriksaan atau razia penduduk sebelum memasuki pusat kota yang merupakan kawasan terpusatnya konflik. Ruang netral yang terbentuk saat masa konflik horizontal di Ambon tersebar pada beberapa titik diantaranya, Kelurahan Honipopu yakni Tugu Trikora, Kantor Polisi Sektor (Polsek) Sirimau, dan Kawasan Benteng Nieu Victoria, serta di Negeri Hative Kecil tepatnya Tugu Lampu Lima

(saat ini berada di bawah Jembatan Merah Putih). Ruang netral ini menempati daerah strategis di dalam Kecamatan Sirimau, mulai dari daerah perbatasan antara permukiman berbeda agama, perbatasan antar kota, dan daerah yang berdekatan dengan pihak keamanan.



Gambar 9. Beberapa ruang yang dimanfaatkan sebagai ruang netral/ruang transaksi pada masa konflik

Sumber: Journeyman Pictures dan observasi penulis, 2025

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap proses transformasi spasial pascakonflik sosial tahun 1999 di Kota Ambon (Studi Kasus: Kecamatan Sirimau), diperoleh beberapa kesimpulan. Transformasi ruang sosial yang terjadi bukanlah suatu proses yang berlangsung secara spontan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang sejalan dengan dinamika perkembangan konflik, seperti perpindahan penduduk, perubahan pola ekonomi, serta penyesuaian dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, muncul ruang sosial baru yakni ruang netral/transaksi yang berfungsi dalam upaya perdamaian selama masa konflik. Diketahui bahwa konflik memberikan perubahan pada ruang yang terjadi bukan hanya menyentuh aspek fisik dari ruang tersebut, tetapi juga mencakup karakteristik dan dinamika sosial masyarakat yang menghuni ruang sosial tersebut. Temuan ini memperkuat hipotesis awal bahwa konflik sosial secara struktural mengubah ruang sosial secara bertahap, dengan segregasi spasial sebagai dampak utama. Studi ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai perubahan kota akibat konflik dan penataan ruang yang inklusif terutama di kawasan Indonesia Timur.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. H., Sukandar, R., Peranto, S., Karib, F., Cholid, S., & Rasyid, I. (2014). *Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon*. The Habibie Center.
- Ayudya, D., & Ikaputra, I. (2022). Memahami Perkembangan Kota Melalui Urban Morphology. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(3), 235–245.

- Az-Zahra, P. A. (2023). Studi Literatur: Kajian Fenomena Gentrifikasi Di Wilayah Pinggiran Kota. *Pondasi: Jurnal Teknik Sipil*, 28(3), 139–154.
- Babere, N. J. (2015). Social Production of Space: “Lived Space” of Informal Livelihood Operators; the Case of Dar es Salaam City Tanzania. *Current Urban Studies*, 3(4), 286–299.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Nainggolan, P. P. (2012). Mengapa Konflik Berulang Terjadi Di Kota Ambon? Tinjauan Demografi dan Keamanan Atas Konflik Horizontal Perkotaan. *Politica*, 3(2), 163–193.
- Permana, Asep. (2014). *Transformasi Gubahan Ruang: Pondokan Mahasiswa di Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung*. Desertasi. Universitas Diponegoro.
- Protasius, D. P. B. I., Hanifatunnauli, L., & Wardani, A. (2022). *The Conception of Space According to Lefebvre and de Certeau*.
- Sigit, G. P., Soetomo, S., Alie, J. S., Doktor Arsitektur dan Perkotaan, P., Diponegoro, U., & Perencanaan Wilayah, J. (2015). *Ruang Netral di Kota Ambon (Segregasi dan Integrasi Ruang Kota)*. <http://proceeding.cousd.org>